



STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA ANAK DI LINGKUNGAN SMP KOTA BANDUNG

Sheila Oktorina¹⁾, Dadan Kurnia²⁾, Zaenal Abidin AS³⁾

1,2,3) Prodi atau Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian berjudul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Anak di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung.” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang berdampak negatif terhadap efektivitas proses pembelajaran peserta didik. Fokus penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP belum dilaksanakan secara optimal. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi dan pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, masih terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah sosialisasi yang belum dilakukan secara merata.

Kata Kunci: Strategi, Kekerasan Pada Anak, Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Abstract

This study is entitled “The Local Government’s Strategies in the Prevention and Handling of Violence Against Children in Junior High Schools in Bandung City.” This research is motivated by the increasing incidence of violence against children in educational institutions, particularly at the junior high school level, which has a negative impact on the effectiveness of students’ learning processes. The focus of this study is the strategies implemented by the Bandung City Local Government in preventing and handling violence against children in junior high school environments. The purpose of this study is to identify and analyze the strategies employed by the Bandung City Local Government in preventing and handling violence against children

in junior high schools in Bandung City. This study employs a descriptive research method with a qualitative approach. The research data were collected through interviews and analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The results indicate that the strategies implemented by the Bandung City Local Government in preventing and handling violence against children in junior high school environments have not been optimally implemented. Although various efforts have been carried out, such as socialization programs and capacity-building training for educators, several obstacles remain in the implementation process, one of which is the uneven distribution of socialization activities.

Keywords: Strategy, Violence Against Children, Junior High School.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan negara pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamantakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui perlindungan terhadap anak sebagai penerus bangsa. Namun, dalam realitas sosial, kekerasan pada anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia dan terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di satuan pendidikan. Kekerasan pada anak tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga berdampak signifikan terhadap proses tumbuh kembang anak serta efektivitas pembelajaran di sekolah.

Fenomena meningkatnya kasus kekerasan pada anak, khususnya di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP), menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi pencegahan serta penanganan kekerasan secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dari pemerintah daerah dalam rangka menjamin perlindungan anak dan mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial di bidang pendidikan.

Fenomena kekerasan pada anak di Kota Bandung masih kerap dianalogikan sebagai fenomena *gunung es*, di mana kasus yang dilaporkan hanya merepresentasikan sebagian kecil dari kejadian yang sebenarnya. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap karena masih adanya anggapan bahwa kekerasan merupakan aib, baik di lingkungan keluarga maupun di satuan pendidikan. Di lingkungan sekolah, kekhawatiran terhadap reputasi dan akreditasi sering kali menyebabkan pihak sekolah enggan melaporkan kasus kekerasan, sehingga tidak seluruh

kasus dapat ditangani secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Bandung perlu memfokuskan strategi pada upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan, serta memastikan mekanisme penanganan yang efektif dan terpercaya agar masyarakat memiliki keyakinan bahwa setiap laporan kekerasan akan ditindaklanjuti secara tepat.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Sosial perlu membangun kolaborasi yang kuat, tidak hanya dalam penanganan kasus yang telah terjadi, tetapi juga dalam upaya pencegahan sejak dini. Dengan demikian, strategi pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah memerlukan pendekatan terpadu dan kolaboratif agar perlindungan anak dapat diwujudkan secara optimal.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah Kota Bandung menetapkan landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merumuskan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah melalui kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Strategi tersebut diwujudkan melalui implementasi program *Zero Bullying* yang diperkuat dengan program *Roots*, termasuk pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di lingkungan sekolah. Selain itu, DP3A Kota Bandung juga melaksanakan sosialisasi di lingkungan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman siswa dan tenaga pendidik mengenai pencegahan kekerasan pada anak, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melakukan upaya pencegahan dan

penanganan kekerasan pada anak di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung. Landasan teori dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai konsep dan teori yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan teori strategi dari Mulgan (Suwarsono, 2012), yang mencakup lima aspek utama: tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Aspek tersebut menjadi landasan untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui jenis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Moleong, 2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pemilihan metode kualitatif ini untuk menentukan, mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan sehingga dapat memperoleh dan memahami pemahaman yang mendalam mengenai Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Anak di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya yaitu semua yang terlibat dalam strategi pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP di Kota Bandung diantaranya Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kota Bandung, Pengelola Bidang Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kota Bandung, Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Kota Bandung, Konselor Umum UPTD PPA Kota Bandung, tenaga pengajar, siswa, dan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang dilakukan peneliti yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, pengambilan

Kesimpulan dan verifikasi. Lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu Kota Bandung.

PEMBAHASAN

Pembahasan yakni mencakup pemaparan dari hasil analisis data yang diajukan untuk memaparkan lebih jauh lagi terkait masing-masing indikator strategi pemerintah daerah dalam penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori Strategi menurut Mulgan yang menyebutkan bahwa keberhasilan sebuah strategi dapat diukur oleh lima indikator yaitu Tujuan (*Purposes*), Lingkungan (*Environments*), Pengarahan (*Directions*), Tindakan (*Actions*), Pembelajaran (*Learning*). Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator dalam penelitian “Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Anak di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung”.

Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Anak di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung

Analisis data penelitian merupakan salah satu bentuk pemaparan hasil penelitian yang didapatkan melalui dengan cara wawancara dengan informan penelitian yang dianggap dapat mewakili dan memberikan data terkait “Strategi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Anak di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung”. Analisis data hasil penelitian lapangan menggunakan teori Strategi menurut Mulgan yang menyebutkan bahwa keberhasilan sebuah strategi dapat diukur oleh lima indikator yaitu Tujuan (*Purposes*), Lingkungan (*Environments*), Pengarahan (*Directions*), Tindakan (*Actions*), Pembelajaran (*Learning*).

1. Tujuan (*Purposes*)

a. Pencapaian Tujuan

Kota Bandung berupaya memberikan perlindungan kepada anak melalui pencegahan dan penanganan kekerasan serta diskriminasi guna

menjamin pemenuhan hak-hak anak. Upaya tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 yang menekankan perumusan kebijakan, program, dan mekanisme perlindungan anak secara terpadu, termasuk pencegahan, pengawasan, pelaporan, serta penanganan korban kekerasan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa DP3A Kota Bandung telah melaksanakan upaya pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan SMP sesuai dengan tujuan yang ditetapkan melalui berbagai program strategis, seperti program Zero Bullying, optimalisasi program Roots, pembentukan Satgas TPPK, serta pengembangan aplikasi Senandung Perdana sebagai sarana pelaporan kasus kekerasan. Namun, dukungan Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan SMP belum terlaksana secara optimal, karena masih berfokus pada pencegahan perundungan. Padahal, bentuk kekerasan yang dialami peserta didik tidak hanya terbatas pada perundungan, tetapi juga mencakup kekerasan seksual dan diskriminasi. Oleh karena itu, upaya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah perlu dilakukan secara komprehensif dan selaras dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian dalam aspek penanganan, hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Sosial belum memiliki perumusan tujuan khusus terkait penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP, namun telah berperan dalam memberikan layanan pendampingan bagi korban, saksi, dan pelaku melalui pemenuhan pelayanan sosial dasar. Sementara itu, DP3A Kota Bandung telah memiliki tujuan penanganan yang lebih spesifik, terutama melalui layanan konseling bagi anak korban, yang berkontribusi terhadap meningkatnya efektivitas penyelesaian kasus kekerasan pada anak di lingkungan SMP.

b. Pencapaian Sasaran atau Target

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan bagian penting dalam perencanaan strategis untuk mengarahkan aktivitas organisasi. Pemerintah Daerah Kota Bandung menetapkan tujuan perlindungan anak melalui upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah sebagai

langkah mewujudkan sekolah bebas kekerasan dan mengatasi fenomena gunung es. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan perencanaan yang jelas, strategi yang terarah, serta kolaborasi dan integrasi antar pemangku kepentingan agar sasaran dapat dicapai secara efektif.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan SMP oleh DP3A Kota Bandung melalui kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya mencapai sasaran, ditandai dengan belum meratanya pelaksanaan sosialisasi, khususnya di sekolah swasta, serta keterbatasan data akurat mengenai tingkat kekerasan di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut mengindikasikan masih rendahnya keterbukaan pelaporan kasus kekerasan. Sebaliknya, Dinas Pendidikan Kota Bandung dinilai telah mencapai sasaran pencegahan secara optimal melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di seluruh SMP di Kota Bandung.

Dalam aspek penanganan, hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung belum memiliki sasaran dan target yang spesifik dalam penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP, sehingga perannya masih bersifat responsif melalui pendampingan berdasarkan laporan dan aduan. Ketiadaan program dan alokasi anggaran khusus mengindikasikan adanya keterbatasan struktural yang menghambat optimalisasi strategi penanganan. Sebaliknya, DP3A Kota Bandung menunjukkan capaian yang relatif baik dalam penanganan kekerasan pada anak melalui layanan konseling dan pendampingan berkelanjutan, yang tercermin dari meningkatnya penyelesaian kasus, meskipun indikator capaian tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus difokuskan pada lingkungan sekolah.

2. Lingkungan (*Environments*)

a. Perilaku dan Pola Pikir Pemerintah Daerah

Dalam menyikapi tindakan kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan SMP, respons yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat dilihat melalui persepsi, pendapat, serta sikap dari aparatur sipil negara yang berada di lingkungan pemerintah daerah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan SMP memerlukan partisipasi aktif keluarga, masyarakat, dan pihak sekolah dalam membentuk perilaku anak serta mendorong mekanisme pelaporan dan edukasi pencegahan kekerasan. Selain itu, komitmen internal Dinas Pendidikan berperan penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak melalui strategi kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan orang tua. Dalam aspek penanganan, hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung sigap dalam menangani kasus kekerasan pada anak di lingkungan SMP melalui pendampingan pekerja sosial yang berkelanjutan, baik bagi korban maupun pelaku. Sementara itu, DP3A Kota Bandung memfokuskan strategi penanganan pada pemulihan psikologis anak korban melalui layanan konseling, dengan menekankan pentingnya keterlibatan aktif sekolah dan orang tua dalam pelaporan kasus sebagai faktor pendukung keberhasilan penanganan secara menyeluruh.

b. Perilaku dan Pola Pikir Masyarakat Sekolah

Perilaku dan pola pikir masyarakat sekolah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP. Oleh karena itu, partisipasi aktif guru, tenaga kependidikan, dan siswa diperlukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah anak, dan kondusif guna mendukung efektivitas pembelajaran serta memperkuat peran sekolah dalam perlindungan anak.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa tenaga pengajar di SMP Negeri 43 Kota Bandung memiliki kesadaran akan pengaruh lingkungan keluarga dan pergaulan terhadap pembentukan karakter siswa, serta berperan aktif dalam mendukung strategi pemerintah daerah melalui berbagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan budaya sekolah yang positif, edukasi pencegahan kekerasan, komunikasi intensif dengan orang tua, serta dorongan pelaporan dan mediasi kasus, yang mencerminkan keterlibatan sekolah dalam perlindungan anak di lingkungan SMP. Kemudian, hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota OSIS dan siswa SMP Negeri 43 Kota Bandung memiliki kesadaran akan pengaruh lingkungan terhadap

pembentukan karakter serta berperan aktif dalam pencegahan kekerasan melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi anti-bullying. Dukungan sekolah yang dirasakan aman, nyaman, serta tersedianya mekanisme pelaporan menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat sekolah dalam mendukung strategi pemerintah daerah, sehingga berkontribusi terhadap efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMP.

Peneliti juga melakukan wawancara dan observasi di salah satu sekolah swasta di Kota Bandung, yaitu SMP Pasundan 2 Kota Bandung. Sekolah ini merupakan satu-satunya SMP di Kota Bandung yang melakukan kegiatan belajar mengajar pada siang hari hingga sore hari. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tenaga pengajar SMP Pasundan 2 Kota Bandung menyadari pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter dan perilaku siswa, serta menghadapi tantangan pembelajaran pada siang hingga sore hari akibat penggunaan gedung bersama. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, sekolah melakukan pengawasan dan komunikasi intensif dengan siswa dan orang tua, serta melaksanakan kegiatan pembinaan karakter sebagai upaya pencegahan kekerasan, sehingga mendukung efektivitas strategi pemerintah daerah meskipun belum terdapat program penanganan kekerasan secara khusus. Kemudian, hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa dan anggota OSIS SMP Pasundan 2 memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan dalam pembentukan karakter dan kenyamanan belajar, namun belum didukung oleh koordinasi dan program pencegahan kekerasan yang terstruktur dari pihak sekolah. Kondisi lingkungan kelas yang kurang kondusif serta lemahnya komunikasi sekolah menegaskan perlunya penguatan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan agar upaya OSIS dapat berjalan efektif dan selaras dengan strategi pemerintah daerah.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan perbedaan orientasi perilaku masyarakat sekolah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak. SMP Negeri 43 Kota Bandung telah menunjukkan pola pikir dan perilaku yang berorientasi pada pencegahan kekerasan melalui langkah-langkah strategis dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif, sehingga berdampak positif terhadap proses

pembelajaran dan mendukung strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung. Sebaliknya, SMP Pasundan 2 Kota Bandung belum sepenuhnya mengimplementasikan pola pikir tersebut secara optimal, yang tercermin dari lemahnya kolaborasi dengan OSIS serta minimnya program konkret pencegahan kekerasan, sehingga partisipasi masyarakat sekolah dalam mendukung strategi pemerintah daerah masih terbatas.

c. Perilaku dan Pola Pikir Masyarakat Umum

Perilaku dan pola pikir masyarakat umum berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang keliru dengan membiarkan atau menormalisasi kekerasan sebagai candaan maupun bentuk pendisiplinan, sementara sebagian lainnya mendorong kebijakan yang lebih tegas dan perlindungan hak anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat umum, melalui peningkatan kesadaran dan sikap tidak mentoleransi kekerasan, menjadi faktor penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah di Kota Bandung.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah masih beragam. Meskipun sebagian masyarakat menunjukkan kepedulian dan kesadaran akan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah kekerasan, masih terdapat anggapan bahwa bentuk ejekan atau candaan tertentu dianggap wajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat dalam mendukung strategi pemerintah daerah belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan partisipasi aktif antara masyarakat, sekolah, dan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.

3. Pengarahan (*Directions*)

a. Pembinaan

Pembinaan merupakan upaya strategis yang dilakukan secara terencana oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui tenaga pengajar

sebagai aktor utama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP. Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kekerasan, memperkuat penerapan kebijakan sekolah, serta menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, aman, dan kondusif bagi proses belajar mengajar.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan pembinaan pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan SMP Kota Bandung belum dilaksanakan secara merata. DP3A dan Dinas Pendidikan telah melakukan pembinaan melalui peningkatan kapasitas guru Bimbingan Konseling (BK) di seluruh SMP sebagai langkah strategis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Namun, pembinaan kepada siswa, khususnya melalui kegiatan sosialisasi oleh DP3A, belum menjangkau seluruh SMP swasta, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan pelaksanaan upaya pencegahan antara sekolah negeri dan swasta. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi dan pemerataan pembinaan agar peran sekolah dalam mendukung strategi pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kemudian, dalam aspek penanganan hasil wawancara menunjukkan pembinaan pada aspek penanganan kekerasan anak di lingkungan sekolah oleh Dinas Sosial dan DP3A melalui UPTD PPA Kota Bandung belum secara khusus difokuskan pada konteks sekolah karena bukan merupakan kewenangan utama serta keterbatasan program dan anggaran. Meskipun demikian, Dinas Sosial tetap berupaya melakukan pembinaan melalui kegiatan *school visit* dan sosialisasi pencegahan kekerasan. Sementara itu, UPTD PPA berperan dalam pembinaan pada tahap penanganan kasus dengan memberikan pemahaman kepada orang tua dan pihak sekolah guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses rehabilitasi anak korban.

b. Motivasi

Motivasi merupakan faktor pendorong penting dalam pelaksanaan strategi agar kerja sama antaraktor dapat berjalan optimal dan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Oleh karena itu, keterlibatan aktif sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah perlu didukung oleh berbagai bentuk motivasi, baik intrinsik, ekstrinsik, struktural dan kebijakan, maupun sosial dan budaya.

Hasil wawancara menunjukkan, dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah, DP3A memberikan motivasi melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi serta pemberian penghargaan *Sekolah Ramah Anak* kepada sekolah yang berhasil menciptakan lingkungan belajar yang aman. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Bandung memberikan motivasi secara tidak langsung melalui peningkatan kapasitas guru Bimbingan Konseling (BK) serta imbauan kepada sekolah untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.

Kemudian, dalam aspek penanganan, Dinas Sosial Kota Bandung memberikan motivasi kepada anak korban melalui pendampingan pekerja sosial serta pembinaan kepada orang tua guna mendukung proses pemulihan yang kondusif. Sementara itu, DP3A Kota Bandung memfokuskan pemberian motivasi secara langsung kepada anak korban melalui layanan konseling dan kegiatan pengembangan potensi, sehingga tidak hanya mendukung pemulihan emosional, tetapi juga mendorong perkembangan diri anak secara berkelanjutan (Creswell, 2019).

4. Tindakan (*Actions*)

a. Tindakan Pencegahan

Upaya pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan SMP Kota Bandung dilakukan oleh DP3A dan Dinas Pendidikan melalui kolaborasi program *Kota Bandung Menuju Zero Bullying*, yang diimplementasikan melalui Program Roots dengan pembentukan TPPK di seluruh SMP sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sekolah ramah anak.

Berdasarkan hasil wawancara, DP3A dan Dinas Pendidikan Kota Bandung telah menjalin kolaborasi yang efektif dan terstruktur dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pembagian peran yang jelas, antara lain pembentukan TPPK di seluruh SMP, penguatan kapasitas sekolah melalui pelatihan guru BK, pemberian predikat *Sekolah Ramah Anak*, serta penyediaan sistem pelaporan yang saling melengkapi. DP3A berfokus pada penguatan pencegahan melalui deklarasi *Bandung Menuju Zero Bullying* dan

sistem pelaporan ramah korban, sementara Dinas Pendidikan menekankan pembinaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat sekolah melalui Satgas PPKSP dan *Lapor Disdik*. Sinergi kedua instansi tersebut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, responsif terhadap perlindungan anak, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bandung.

Selain perlunya tindakan dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah, partisipasi aktif pihak sekolah, khususnya para guru yang memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara, kedua sekolah menunjukkan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak melalui keterlibatan seluruh unsur sekolah dan penerapan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Meskipun pendekatan yang digunakan berbeda, keduanya menekankan pembiasaan kegiatan positif sebagai sarana pembentukan karakter siswa, termasuk melalui keterlibatan siswa sebagai agen perubahan. Peneliti menganalisis bahwa upaya pencegahan di lingkungan SMP Kota Bandung telah berjalan cukup optimal dan dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, meskipun pelibatan orang tua dan masyarakat belum sepenuhnya maksimal. Melalui penguatan strategi inovatif, pemerintah daerah berupaya mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, bebas dari kekerasan, serta mendukung tercapainya sekolah ramah anak dan kawasan *Zero Bullying* di Kota Bandung.

b. Tindakan Penanganan

Penanganan anak korban kekerasan di Kota Bandung dilakukan oleh Dinas Sosial dan DP3A melalui UPTD PPA dengan pendekatan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara komprehensif. Dinas Sosial berfokus pada pendampingan hukum dan sosial bagi korban, saksi, dan pelaku, sedangkan DP3A memberikan layanan rehabilitasi serta pendampingan psikologis, keagamaan, dan hukum melalui proses penjangkauan dan asesmen awal untuk menentukan layanan lanjutan yang sesuai.

Hasil wawancara menunjukkan, penanganan kasus kekerasan pada anak di lingkungan SMP Kota Bandung dilakukan secara komprehensif

melalui kolaborasi antara DP3A dan Dinas Sosial. DP3A menyediakan layanan konseling berbasis SOP dengan pendekatan psikologis dan terapeutik yang melibatkan anak korban dan orang tua serta didukung koordinasi dengan pihak sekolah, sementara Dinas Sosial memberikan pendampingan hukum dan sosial bagi anak korban maupun pelaku melalui mediasi dan diversifikasi. Strategi kolaboratif ini dinilai efektif dalam memperkuat sistem perlindungan anak dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta kondusif bagi proses pembelajaran.

Meskipun pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di lingkungan SMP, partisipasi aktif pihak sekolah tetap diperlukan dalam upaya penanganan tersebut. Sekolah berperan sebagai pihak pertama yang dapat memberikan penanganan awal kepada anak korban kekerasan sebelum mendapatkan pendampingan lebih lanjut dari instansi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sekolah telah memahami metode penanganan kekerasan pada anak dengan pendekatan yang beragam. Salah satu inovasi dilakukan oleh SMP Negeri 43 Kota Bandung melalui pengembangan aplikasi pelaporan "Bejakeun" yang memudahkan siswa melaporkan kasus kekerasan secara aman dan cepat. Penanganan di tingkat sekolah umumnya dilakukan melalui mediasi, pemberian sanksi, pengawasan, serta layanan konseling bagi korban dan pelaku, sementara kasus berat atau yang tidak terselesaikan dilanjutkan kepada Dinas Pendidikan dan DP3A. Upaya tersebut diperkuat oleh peran Pemerintah Daerah melalui pendampingan hukum oleh Dinas Sosial dan layanan konseling oleh DP3A, sehingga penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP dapat dilakukan secara terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak serta pemulihan anak.

c. Komunikasi

Komunikasi menjadi elemen penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP, yang dilakukan secara kolaboratif oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui DP3A, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial, serta diperkuat melalui komunikasi antara

pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara DP3A dan Dinas Pendidikan Kota Bandung telah terjalin secara strategis dan terkoordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP, yang diwujudkan melalui penguatan peran TPPK, pelatihan guru, serta implementasi program Sekolah Ramah Anak, sehingga kedua instansi berperan tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.

Dalam aspek penanganan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Dinas Sosial, UPTD PPA, dan DP3A terjalin secara terstruktur dalam penanganan kasus kekerasan pada anak, melalui pendampingan hukum, proses asesmen, mediasi, dan diversifikasi oleh Dinas Sosial yang kemudian ditindaklanjuti oleh UPTD PPA melalui layanan konseling, serta dikoordinasikan dan diawasi oleh DP3A sebagai dasar perumusan kebijakan dan strategi perlindungan anak.

5. Pembelajaran (*Learning*)

a. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui kolaborasi DP3A, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial sebagai proses sistematis untuk menilai pelaksanaan kebijakan, yang hasilnya digunakan sebagai dasar perumusan langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP di Kota Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A dan Dinas Pendidikan Kota Bandung memiliki komitmen tinggi dalam mencegah kekerasan pada anak di lingkungan SMP melalui evaluasi yang berkelanjutan, antara lain penyusunan Buku Profil Anak sebagai basis data kebijakan, monitoring dan evaluasi kinerja TPPK, serta rapat evaluasi tahunan untuk menilai peran guru BK, efektivitas program, dan tingkat partisipasi sekolah. Evaluasi tersebut menjadi dasar perumusan strategi perbaikan guna memperkuat

pencegahan kekerasan sekaligus meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di seluruh SMP Kota Bandung.

Kemudian, terdapat evaluasi dalam aspek penanganan tindakan kekerasan pada anak di lingkungan SMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan pada anak di lingkungan SMP oleh Dinas Sosial Kota Bandung belum optimal akibat belum adanya mekanisme evaluasi yang terstruktur, keterbatasan SDM dan anggaran, serta belum jelasnya SOP dan prioritas penanganan. Sebaliknya, UPTD PPA menunjukkan penanganan yang lebih serius dan sistematis melalui tindak lanjut setiap laporan, evaluasi berkala bersama DP3A, penilaian kompetensi pendamping, serta pemantauan berkelanjutan terhadap korban dan pelaku. Perbedaan tingkat keseriusan dalam evaluasi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas strategi pemerintah daerah dalam penanganan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di lingkungan SMP telah dilaksanakan secara kolaboratif melalui peran DP3A, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Upaya pencegahan dilakukan melalui program Zero Bullying, pembentukan TPPK, pelatihan guru BK, serta penguatan sistem pelaporan yang ramah anak, sementara penanganan kasus dilakukan melalui pendampingan hukum dan layanan konseling sebagai bentuk pemenuhan hak anak. Keberhasilan strategi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam aspek pengarahan dan pemerataan sosialisasi, khususnya di SMP swasta, serta keterbatasan kewenangan dan anggaran pada beberapa instansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan SOP yang terintegrasi agar strategi pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak dapat berjalan secara lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah. (2016). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 279-295.
- Creswell. (2019). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Hasanah. (2016). Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat. *Social Work*, 80-92.
- Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Salusu. (2016). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. PT Grasindo.
- Suwarsono, M. (2012). *Strategi Pemerintah: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.